

Paradigma Pengajaran Pembangunan Ekonomi Pancasila

Sitti Maryam¹, Israwati Akib², Andi Arifuddin Iskandar³
^{1,2,3}Universitas Patompo

Email : sitti.patajai@gmail.com¹., israakibshmh@gmail.com²., arifuddin271@gmail.com³

Abstrak

Pembangunan ekonomi di Indonesia, mengacu pada idiologi bangsa Indonesia yakni Pancasila. Pelaksanaan pembangunan ekonom yang berlandaskan pada Pancasila menanamkan nilai-nilai moral dan etika Pancasila, senantiasa berasaskan pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia bersumber pada jiwa dan semangat gotong royong serta kekeluargaan. Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dimaksud, telah terkait dengan pelaksanaan pembangunan ekonomi seperti tercermin nilai-nilai Pancasila yakni; Ketuhanan, Kemanusia, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial.

Kata Kunci; Pengajaran, Pembangunan Ekonomi dan Pancasila

PENDAHULUAN

Pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, termuat dengan jelas kelima nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Kelima sila Pancasila tersebut, menjadi jiwa dan semangat pembangunan ekonomi dalam rangka mensejahterakan dan memakmurkan seluruh rakyat Indonesia. Pelaksanaan pembangunan ekonomi Pancasila yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh anak bangsa menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah. Untuk

memajukan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, maka terlebih dahulu diupayakan meningkatkan perekonomian dan sumber daya manusia, hal ini perlu ditunjang dengan kemajuan infrastruktur berupa sarana dan prasarana yang cukup dan memadai, sehingga pembangunan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia dapat terlaksana dengan baik dan cepat. Di samping itu untuk mempercepat peningkatan pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia perlu ada kerja sama antara pemerintah dengan pihak swasta. Hal ini

perlu disosialisasikan sehingga mudah terlaksana sebagaimana dikehendaki.

Selanjutnya salah satu tawaran yang diajukan untuk dipertimbangkan dalam rangka mempercepat pelaksanaan sosialisasi dimaksud, dapat dilakukan melalui penerapan teori dan konsep pendidikan sebagaimana yang dianut dalam sistem pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pentingnya aplikasi dan implementasi terhadap penerapan konsep dan teori pendidikan tersebut karena eksistensi pendidikan senantiasa berorientasi kepada usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran bagi setiap peserta didik secara aktif dengan cara mengembangkan potensi diri peserta didik untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi masyarakat, bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Pengajaran ekonomi Pancasila yang diberikan pada mahasiswa, bertujuan untuk menyiapkan tenaga pendidik yang memiliki pengetahuan dan keterampilan ekonomi yang menanamkan nilai-nilai Pancasila, berorientasi pada Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Berkedilan sosial.

Dalam perkembangan dewasa ini, dengan kemajuan ilmu dan teknologi serta berlakunya era perdagangan bebas lintas

negara, maka selaku pelaku ekonomi atau/dan konsumen dalam transaksi secara online, sangat berpeluang terjadi kecurangan-kecurangan bahkan penipuan atau perbuatan melanggar hukum lainnya. Berkenaan hal tersebut, maka salah satu tugas pemerintah dengan membuat regulasi serta memberikan pengajaran ekonomi Pancasila bagi mahasiswa dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan kepentingan masyarakat serta perbuatan yang dapat dikategorikan suatu perbuatan melawan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ilmiah ini menerapkan dan/atau sekaligus menggunakan metode penelitian normative yang memfokuskan perhatian pada sejarah terbentuknya atau sejarah perubahan, dimana penelitian semacam ini mempelajari berbagai dokumen atau kepustakaan institusi negara (Saharuddin Nawi, 2014 : 64-65). dimaksudkan untuk berupaya semaksimal mungkin meneliti eksistensi Pancasila dari berbagai aspek. Pelaksanaan penelitian ilmiah terhadap Pancasila, baik sebagai dasar filosofi negara maupun sebagai norma etika dan dasar penyusunan ekonomi kerakyatan bangsa Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai luhur Pancasila. Oleh karena itu, sehingga keberadaan ekonomi Pancasila

dipandang perlu diajarkan kepada segenap mahasiswa Fakultas Pendidikan Dan Keguruan Pada Universitas Patempo Makassar.

Adapun jenis penelitian yang ditawarkan di atas, dapat dikategorikan ke dalam salah satu bentuk penelitian ilmiah yang bersifat teoritis (Muhammad.2004 : 101-102). Dengan demikian akan sangat mendukung bilamana penerapan metode penelitian dimaksud, lebih berorientasi kepada pendekatan analitis sejarah (*approach of Historical analysis*). Sedang objek sejarah yang diteliti kesemuanya mempersoalkan berbagai masalah berkenaan dengan keberadaan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila sehubungan dengan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Memahami Potensi Manusia Pancasila

Dengan merujuk alasan sosiologis yang telah dikemukakan di atas, menjadi semakin jelas bahwa karakter manusia Pancasilais selaku anak bangsa dapat dibentuk melalui jalur pendidikan dan pengajaran, baik yang dilaksanakan pemerintah maupun yang disponsori pihak swasta seperti dicontohkan Universitas Patempo Makassar. Fenomena yang

demikian ini teramat penting dikemukakan, karena setiap anak bangsa yang hendak diberikan karakter nasional yang berkebangsaan tidak terlepas dari eksistensinya dan sifat dasarnya sebagai manusia ciptaan Allah Subbehanahu Wa Taalah (SWT).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka yang pertama-tama harus diingat yakni setiap manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifah di atas bumi dilengkapi dengan akal pikiran manusia. Bilamana otak manusia mulai bekerja, baik dengan cara menghayal maupun melalui cara memikirkan segala sesuatu yang selama ini terbayang dan membayangi kehidupannya, diharapkan akan memberikan sumbangsi bagi lahirnya konsep pengajaran ekonomi Pancasila. Di samping itu, manusia juga mempunyai naluri serta hasrat keingin tahu sesuatu, sehingga selalu ingin bertanya atau mempertanyakan sesuatu, mulai dari hal-hal yang sederhana sampai pada hal-hal yang sangat rumit. Contohnya; mempertanyakan bagaimana paradigm pengajaran pembangunan terhadap ekonomi Pancasila ?.

Syamsuddin Pasamai (2017), bahwa adanya motivasi sifat keingintahuan dari setiap manusia inilah yang pada akhirnya mampu memberikan sugesti untuk senantiasa melakukan berbagai aktivitas seperti penelitian (ilmiah dan non ilmiah). Tujuannya agar supaya memperoleh suatu informasi sesuai yang dibutuhkan dalam pengajaran ekonomi Pancasila. Bahkan manusia Pancasila termotivasi untuk belajar dalam melakukan suatu percobaan-percobaan, tanpa mempersoalkan, apakah hasil yang diperoleh dari percobaan itu benar atau salah, baik atau buruk, indah atau jelek atau berhasil atau gagal. Sehingga dari kegagalan atau keberhasilan dari suatu percobaan-percobaan dapat diperoleh ilmu untuk perbaikan dan perkembangan methodologi dalam berupaya mengajarkan paradigma pembangunan ekonomi Pancasila kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi mahasiswa Universitas Patompo Makassar.

2. Eksistensi Ekonomi Pancasila

Pada bagian ini perlu diberikan penjelasan dari para pakar dan ahli ekonomi berkenaan penggunaan istilah ekonomi yang

berasal dari bahasa Yunani kata “*oikos*” artinya rumah tangga atau keluarga sedang “*nomos*” artinya aturan, peraturan dan hukum. Kemudian dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S Poerdarminta, diartikan ekonomi sebagai pengetahuan dan penyelidikan mengenai azas-azas penghasilan (produksi), pembagian (distribusi) dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti halnya keuangan, perindustrian perdagangan, dst). Dengan demikian, maka penggunaan istilah ekonomi atau perekonomian dapat diartikan sebagai suatu kegiatan usaha yang mencakup semua aktivitas yang berkaitan dengan produksi, konsumsi, dan perdagangan barang dan jasa.

Menurut Subiakto Tjakrawerdana, dkk (2021:98-99), mengemukakan tujuan yang hendak dicapai sistem ekonomi merupakan sasaran akhir yang diinginkan dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi. Selain itu, tujuan tersebut juga berperan sebagai acuan bagi tiga unsur dari elemen system ekonomi. Hal ini mengandung arti bahwa tatanan dan implementasi dari sumber daya, pelaku ekonomi (partisipan),

proses penyelenggaraan kegiatan ekonomi berorientasi pada tujuan akhir, yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun demikian, sistem tadi memiliki dimensi dan cakupan yang berbeda dalam menentukan kepada siapa kesejahteraan itu ditujukan. Apakah kepada individu atau kepada masyarakat ?. Dalam sistem ekonomi kapitalis, kesejahteraan lebih dimaknai pada “kesejahteraan individu”. Sementara, dalam sistem ekonomi sosialis, kesejahteraan lebih dimaknai pada : kesejahteraan kolektif/bersama

Menurut Emil Salim selaku ahli ekonomi (Ismail,dkk, 2014), beliau pertama kali mempergunakan istilah ekonomi Pancasila. Mengawali pemikiran beliau berlandaskan pada UUD 1945 dan GBHN serta menyebutkan lima ciri dari ekonomi Pancasila sebagai berikut :

Pertama, peranan negara beserta aparatur ekonomi negara adalah penting, tetapi tidak dominan, agar dicegah tumbuhnya sistem etatisme (serba negara). Peranan swasta lebih penting, tetapi juga tidak didominasi agar

dicegah tumbuhnya *free fight liberalism*.

Kedua, hubungan kerja antar lembaga-lembaga ekonomi tidak didasarkan pada dominasi modal seperti halnya system ekonomi kapitalisme.

Ketiga, masyarakat sebagaisatu kesatuan memegang peranan sentral dalam ekonomi Pancasila.

Keempat, negara menguasai bumi,air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang merupakan pokok bagikemakmuran rakyat.

Kelima, ekonomi Pancasila tidak bebas nilai.

Sistem ekonomi yang dikembangkan suatu negara berdasarkan pada idiologi dari negara dimaksud. Indonesia yang beridiologi Pancasila, maka wajar dan patut bilamana sistem ekonominya menganut sistem ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila sendiri memberikan kebebasan kepada seluruh warga negara untuk berusaha atau membangun usaha perekonomian dengan batasan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh pemerintah..Mubyarto, dalam Makalah Seminar Bulanan, berjudul

“Ekonomi Pancasila, menyatakan salah satu unsur intrinsiknya adalah Ekonomi Pancasila yang nilai-nilai dasar :

- a. Ketuhanan, di mana “roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral”.
- b. Kemanusiaan, “kemerataan sosial, yaitu ada kehendak kuat warga masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial, tidak membiarkan terjadi dan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial”.
- c. Kepentingan Nasional (Nasionalisme Ekonomi), di mana “nasionalisme ekonomi; bahwa dalam era globalisasi makin jelas adanya urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri”.
- d. Kepentingan rakyat banyak (Demokrasi ekonomi) : ”demokrasi ekonomi berdasar kerakyatan dan kekeluargaan; koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat”.

- e. Keadilan Sosial, yaitu : “keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan otonomi yang luas, bebas, dan bertanggungjawab, menuju pewujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

Bertolak dari uraian di atas, maka semakin jelas bahwa eksistensi dari pada pemahaman terhadap konsep dan teori ekonomi Pancasila di dalamnya senantiasa mengandung nilai-nilai; Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, maka kelima nilai luhur Pancasila yang menjadi tonggak kuat terbentuknya ekonomi Pancasila sedapat mungkin diupayakan agar tetap turut serta menjadi kompas (menunjuk arah) dalam menyusun dan menetapkan paradigma pembangunan ekonomi pancasila.

3. Ekonomi Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan

Menurut pandangan Sitti Maryam, dkk (2020 : 121-126) antara lain mengemukakan, bahwa; Pelaksanaan pembangunan nasional sebagai salah satu upaya mencapai tujuan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hal ini sebagai perwujudan praksis dalam meningkatkan harkat dan bartabatnya. Tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, rinciannya (tujuan nasional) *“melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”* hal ini dalam kapasitasnya tujuan negara hukum formal, adapun rumusan *“memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa”* hal ini dalam pengertian neohumanisme hukum material yang secara keseluruhan sebagai manifestasi tujuan khusus atau nasional. Sedang tujuan internasional (tujuan umum) terumus *“ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”* hal ini diwujudkan dalam tata pergaulan masyarakat internasional.

Menurut Kaelan (2010) menyatakan, bahwa konsekuensi realisasi pembangunan nasional dalam berbagai bidang untuk

mewujudkan peningkatan harkat dan martabat manusia secara konsisten berdasarkan pada nilai-nilai hakikat kodrat manusia. Maka pembangunan nasional harus meliputi aspek jiwa (rokhani) yang mencakup akal, rasa dan kehendak. Sedang aspek raga (jasmani), aspek individu, aspek makhluk sosial, aspek pribadi dan juga aspek kehidupan ketuhanannya. Kemudian pada gilirannya dijabarkan dalam berbagai bidang pembangunan, antara lain; politik, ekonomi, hukum, pendidikan, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kehidupan agama.

Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana manusialah yang berperan akan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabatnya. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), merupakan suatu hasil kreativitas rohani atau jiwa manusia. Unsur jiwa (rokhani) manusia meliputi aspek akal, rasa dan kehendak. Akal merupakan potensi rokhania manusia dalam hubungan dengan intelektualitas, rasa dalam bidang estetis dan kehendak dalam bidang moral (etika).

Kemudian atas dasar kreativitas akal manusia mengembangkan iptek dalam rangka untuk mengolah kekayaan alam yang disediakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, maka tujuan esensial dari iptek adalah demi kesejahteraan umat manusia, sehingga pada hakikatnya iptek tidak bebas nilai namun terikat oleh nilai. Dalam masalah yang demikian ini, berarti Pancasila telah memberikan dasar nilai-nilai bagi pengembangan iptek demi kesejahteraan hidup manusia. Pengembangan iptek sebagai hasil budaya manusia harus didasarkan pada moral Ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab

T. Jacob dikutip Kaelan (2010) mengemukakan, bahwa Pancasila yang sila-silanya merupakan suatu kesatuan yang sistematis haruslah menjadi sistem etika dalam pengembangan iptek di bidang ekonomi. Sedang sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengkomplementasikan ilmu pengetahuan, mencipta, perimbangan antara rasional dan irasional, antara akal, rasa dan kehendak dalam pengembangan ekonomi. Berdasarkan sila pertama tersebut, iptek di bidang ekonomi tidak hanya

memikirkan keuntungan, tetapi juga dipertimbangkan maksudnya dan akibatnya apakah merugikan pelaku ekonomi lainnya..

Selanjutnya mengenai sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek dibidang ekonomi haruslah bersifat beradab. Iptek adalah sebagai hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral. Oleh karena itu, pengembangan iptek harus didasarkan pada hakikat tujuan demi kesejahteraan umat manusia. Iptek bukan untuk tujuan kesombongan, kecongkaan, dan keserakaan manusia namun harus diabdikan demi peningkatan harkat dan martabat manusia.

Kemudian untuk sila Peraturan Indonesia mengkomplementasikan universalialia dan internasionalisme (kemanusiaan) dalam sila-sila yang lain. Dan pengembangan iptek di bidang ekonomi diarahkan demi kesejahteraan umat manusia termasuk di dalamnya kesejahteraan bangsa Indonesia. Pengembangan iptek di bidang ekonomi hendaknya dapat mengembangkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa serta keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat

manusia di dunia. Sedang untuk sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, mendasari pengembangan iptek di bidang ekonomi secara demokratis. Artinya setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek dan ekonomi. Selain itu dalam pengembangan iptek dibidang ekonomi setiap ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dan harus memiliki sikap yang terbuka, artinya terbuka untuk dikritik, dikaji ulang maupun dibandingkan dengan penemuan teori teori lainnya yang berhubungan

Lebih lanjut dijelaskan eksistensi sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengkomplementasikan pengembangan iptek haruslah menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia yang lain, manusia dengan masyarakat bangsa dan negara serta manusia dengan alam lingkungannya. Kesimpulannya, pada

hakikatnya sila-sila Pancasila harus merupakan sumber nilai, kerangka pikir, serta basis moralitas bagi pengembangan iptek.

Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan bidang ekonomi oleh Mubyarto dalam Oesman dan Alfian (Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2016) telah memaparkan lima prinsip pembangunan ekonomi yang senantiasa mengacu pada nilai-nilai Pancasila, Adapun kelima prinsip pembangunan ekonomi nasional yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila, sebagai berikut :

- a. Ketuhanan, di mana “roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral”
- b. Kemanusiaan, yaitu : “kemerataan sosial, yaitu ada kehendak kuat warga masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial, tidak membiarkan terjadi dan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial”.
- c. Kepentingan Nasional (Nasionalisme Ekonomi), di mana “nasionalisme ekonomi; bahwa dalam era globalisasi makin jelas

- adanya urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri”.
- d. Kepentingan Rakyat Banyak (Demokrasi ekonomi) : ”demokrasi ekonomi berdasar kerakyatan dan kekeluargaan; koperasi dan usahausaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat”.
- e. Keadilan Sosial, yaitu : “keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan otonomi yang luas, bebas, dan bertanggungjawab, menuju pewujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dari kelima nilai-nilai Pancasila di atas, tersangat perlu ditarapkan dalam pengembangan dan pembangunan ekonomi di Indonesia., karena Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, falsafah bangsa yang perlu dijaga dan dipertahankan, sehingga etika dalam membangun ekonomi tidak melepaskan ruh dari nilai-nilai bangsa Indonesia.

PENUTUP

Salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melalui pengajaran, baik formal maupun non formal. Sistem ekonomi mengacu pada idiologi Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, didalamnya mengandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dengan mengedepankan nilai religius, moral, etika, sosial dan kultural. Nilai-nilai dimaksud telah terangkum di dalam kelima sila-sila Pancasila yakni; Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Disamping itu ekonomi Pancasila, juga berasaskan pada jiwa dan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Paham kekeluargaan yang dianut di Indonesia dapat dipahami ,bahwa kepentingan masyarakat, suku, atau bangsa lebih didahulukan daripada kepentingan individu. Namun selaku individu tetap diakui harkat dan martabatnya serta tetap mendapat perlingungan dan penghormatan hak asasi manusia. selaku warga negara Indonesia. Pembangunan ekonomi yang beridiologi Pancasila pada hakikatnya sila-sila Pancasila harus merupakan sumber nilai, kerangka pikir, serta basis moralitas bagi pengembangan dan pembangunan iptek.dibidang ekonomi yang berasaskan pada Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim; 2016. *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia*, Jakarta.
- Ismail, dkk. 2014. *Sistem Ekonomi Indonesia Tafsiran Pancasila dan UUD 1945*, Erlangga, Jakarta.
- Kaelan; 1993. *Proses Perumusan Pancasila dan UUD 1945*. Liberty, Yogyakarta.
- ; 2000. *Pendidikan Pancasila. Paradigma*, Yogyakarta.
- ; 2002. *Filsafat Pancasila, Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Paradigma, Yogyakarta.
- Mubyarto; 2008. *Makalah Seminar Bulanan, "Ekonomi Pancasila, Satu Renungan Akhir Tahun dan Perkembangan Pemikiran Ekonomi Pancasila,"*Jilid 3. Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM,UGM.2008, Yogyakarta.
- Mustafa Kamal Rokan; 2010. *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktekdi Indonesia)*, PT.Raja Grafindo, Jakarta.
- Notonegoro; 1994. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Sahabuddin; 2007, *Belajar Dan Mengajar Dua Aspek Dari Suatu Proses Yang Disebut Pendidikan*. UNM, Makassar.
- Sitti Maryam; dkk. *Urgensi Pendidikan Pancasila Pada Perguruan Tinggi*. Tallasa Media, Gowa.
- Subiakto Tjakrawerdana,dkk; 2022. *Sistem Ekonomi Pancasila*. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Syahrudin Nawi, H; 2014. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.
- Syamsuddin Pasamai, dkk; 2017. *Bisnis Tanah Dalam Teori Dan Praktek (Suatu Kajian Hukum Pertanahan)*. UMI Pres, Makassar.
- W.J.S Poerdarminta; 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.